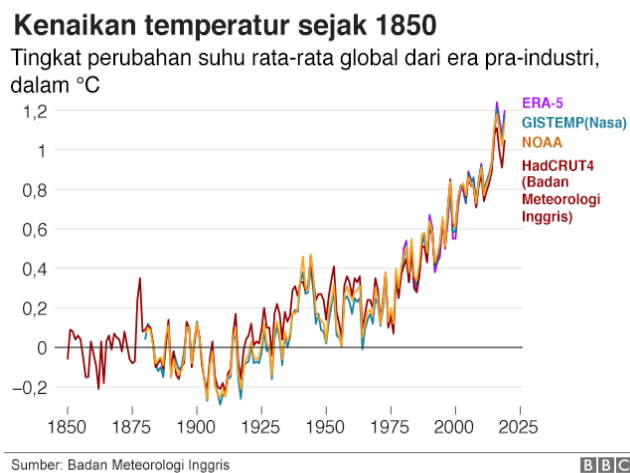


BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pemanasan global merupakan fenomena yang terjadi secara global sebagai dampak dari rata-rata suhu udara di bumi yang meningkat. Kondisi ini diakibatkan efek gas rumah kaca, misalnya karbondioksida dan metana, yang terperangkap di atmosfer sehingga meningkatkan suhu permukaan bumi. Kelanjutan pemanasan global berpotensi menimbulkan dampak lingkungan yang signifikan dan mengancam keberlangsungan hidup manusia. Dampak tersebut meliputi perubahan pola curah hujan, peningkatan suhu rata-rata, hingga intensitas cuaca ekstrem yang lebih tinggi, seperti kekeringan dan banjir. Kondisi kekeringan sendiri dapat memengaruhi banyak wilayah, dengan risiko kebakaran hutan serta menurunnya ketersediaan air bersih.



Gambar 1. 1 Grafik Kenaikan Suhu Global

Sumber: (<https://www.bbc.com/indonesia/dunia-53441989>) diakses pada 25 Mei 2025

Kenaikan suhu rata-rata global tercatat sebesar 1,5°C dibandingkan dengan era pra-industri, saat manusia belum memanfaatkan bahan bakar fosil secara masif. Kondisi ini menjadi sinyal penting bagi upaya penanganan perubahan iklim di tingkat internasional. Berdasarkan laporan PBB pada tahun 2018, ancaman perubahan iklim, seperti kepunahan satwa liar, kenaikan permukaan laut, dan gelombang panas ekstrem, diperkirakan meningkat hingga mencapai 2°C dibandingkan dengan ambang 1,5°C. Dikutip dari berita BBC News Indonesia.com dalam siaran pers pada 10 Februari 2024 *Copernicus Climate Change Service* Uni Eropa menyampaikan

BBC News Indonesia.com – “Suhu global menunjukkan tren peningkatan yang cukup cepat. Selama periode Februari 2023 hingga Januari 2024, pemanasan global tercatat sebesar 1,52°C. Menurut laporan *Berkeley Earth*, lembaga sains asal Amerika Serikat, suhu rata-rata pada tahun kalender 2023 telah melebihi 1,5°C dibandingkan tingkat pra-industrialisasi. Namun, data dari NASA menunjukkan bahwa rata-rata suhu dalam 12 bulan terakhir masih berada sedikit di bawah 1,5°C.” Sumber: (<https://www.bbc.com/indonesia/articles/cedqye0qng1o>) diakses 25 Mei 2025

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 disahkan sebagai bentuk komitmen Indonesia terhadap perubahan iklim global sekaligus partisipasinya dalam Perjanjian Paris. Pejabat negara yang meratifikasi Perjanjian Paris wajib menyampaikan *Nationally Determined Contributions* (NDC) terkait target penurunan emisi gas rumah kaca hingga tahun 2030. Pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, hal ini dikoordinasikan oleh Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim (PPI), yakni Ruandha Agung, menyampaikan

“Strategi jangka panjang untuk mencapai *zero emission* dilakukan melalui penyesuaian tujuan dan target pengendalian perubahan iklim dengan agenda pembangunan nasional, sub-nasional, maupun

internasional, termasuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*/SDGs). Selain itu, pemerintah juga berperan dalam menjalin kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan guna mendorong inovasi serta memperkuat upaya pengendalian perubahan iklim”. Sumber: (<https://ppid.menlhk.go.id/berita/siaranpers/5870/%20perkembangan-ndc-dan-strategi-> diakses pada 25 Mei 2025).

Upaya pengendalian perubahan iklim di Indonesia tidak hanya pada komitmen global seperti perjanjian paris, tetapi juga sejalan dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs) sebagai agenda pembangunan berkelanjutan dunia hingga tahun 2030. Salah satu tujuan yang relevan adalah SDG 13 tentang Penanganan Perubahan Iklim yang menekankan pentingnya memperkuat ketahanan dan kapasitas adaptasi terhadap ancaman iklim di dunia termasuk melalui aksi pada masyarakat. Selain itu upaya adaptasi dan mitigasi yang dilakukan pemerintah dan masyarakat juga berkaitan dengan SDG 11 tentang kota dan permukiman berkelanjutan, sehingga ketahanan lingkungan pada kawasan permukiman menjadi faktor penting dalam menciptakan kota yang aman dan inklusif. Pada SDG lain yaitu SDG 6 tentang air bersih dan sanitasi dan SDG 15 tentang ekosistem daratan yang juga mendorong pengelolaan sumber daya air, perlindungan lingkungan dan pelestarian ruang terbuka hijau yang menjadi isu penting di wilayah perkotaan. Maka kebijakan dan program pengendalian perubahan iklim yang dijalankan di Indonesia termasuk yang berkaitan dengan masyarakat menjadi bagian dari upaya pencapaian target pembangunan berkelanjutan secara nasional dan global..

Program Kampung Iklim (ProKlim) merupakan program nasional yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mendorong

keterlibatan masyarakat dalam upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim berbasis wilayah. Program ini menyoar kelompok masyarakat di tingkat RT, RW, desa atau kelurahan sebagai pelaksana utama kegiatan lingkungan yang sesuai dengan potensi lokal. Penerapan ProKlim sudah dilakukan menyeluruh dan menjadi salah satu upaya pemerintah dalam memperkuat aksi iklim dan berkontribusi pada pengurangan emisi dan peningkatan ketahanan iklim yang digerakan masyarakat. Dalam Pameran Virtual ProKlim yang diselenggarakan *Global Green Growth Institute* tahun 2021, Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim KLHK yaitu, Laksmi Dhewanti, menegaskan bahwa keberhasilan program ini membutuhkan kolaborasi dari berbagai pihak. Dukungan pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sangat diperlukan untuk memperkuat aksi adaptasi serta mitigasi perubahan iklim, sekaligus memastikan keberlanjutan pelaksanaan ProKlim.

“ProKlim mendorong seluruh lapisan masyarakat untuk berperan sebagai pelopor sekaligus penggerak dalam menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Setiap individu memiliki kesempatan menjadi aktor utama dalam menjaga serta mewujudkan kelestarian lingkungan hidup.” Sumber: (<https://ppid.menlhk.go.id/berita/siaranpers/6011/pemerintah-targetkan-20000-kampung-iklim-pada-2024>) diakses pada 26 Mei 2025.

Partisipasi masyarakat dalam program kampung iklim juga mempunyai keterkaitan dengan pencapaian tujuan SDGs terutama melalui aksi di tingkat tapak. Peran masyarakat dalam kegiatan penghijauan, pengelolaan sampah, konservasi air, serta urban farming menjadi kontribusi nyata pada SDG 11 tentang kota dan permukiman berkelanjutan serta SDG 13 tentang penanganan perubahan iklim, sehingga kedua poin SDGs tersebut menekankan pentingnya keterlibatan

komunitas dalam menjaga keberlanjutan lingkungan. Partisipasi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan program lingkungan tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah tetapi juga kesadaran dan gotong royong masyarakat untuk membangun ketahanan iklim, meningkatkan kualitas hidup dan memperkuat kapasitas adaptasi terhadap risiko perubahan iklim. Maka partisipasi masyarakat dalam ProKlim tidak hanya menjadi indikator keberhasilan program tetapi juga menjadi faktor penting mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

Keterlibatan masyarakat dalam Program Kampung Iklim diatur dalam peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.84/MENLHK-SETJEN/KUM.1/11/2016 Pasal 6 ayat (4), yang menjelaskan bahwa masyarakat menjadi penanggung jawab utama dalam pelaksanaan kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di tingkat tapak. Peraturan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan ProKlim sangat bergantung pada tingkat partisipasi masyarakat, bukan hanya pada dukungan pemerintah atau pihak eksternal. Dalam teori oleh Hamijoyo dan Iskandar melalui lima bentuk partisipasi masyarakat yaitu, partisipasi buah pikiran, partisipasi tenaga, partisipasi harta benda, partisipasi keterampilan dan kemahiran dan partisipasi sosial. Kelima bentuk partisipasi menjadi indikator partisipasi masyarakat dalam melaksanakan ProKlim. Maka keterlibatan masyarakat tidak hanya hadir dalam kegiatan tetapi juga memberikan ide, tenaga, sumber daya, kemampuan teknis dan upaya menjaga solidaritas sosial.

Pelaksanaan Program Kampung Iklim, keterlibatan masyarakat perlu dilakukan dengan prinsip transparansi, konsistensi, akuntabilitas dan kepastian hukum dalam kegiatan yang dilakukan. Pelaksanaan program kampung iklim

diharapkan mampu mendorong kemandirian masyarakat, membangun kepercayaan dan kredibilitas antara pengurus dan masyarakat, memperkuat kemitraan dengan berbagai pihak serta menghasilkan capaian di masa mendatang. Namun dalam praktiknya masih terdapat sebagian masyarakat yang belum sepenuhnya tergerakkan baik dalam keterlibatan pada kegiatan, dukungan maupun keberlanjutan aksi lingkungan. Kondisi ini minimnya partisipasi masyarakat belum menunjukkan konsistensi perilaku ramah lingkungan.

Peringkat	Provinsi	Kabupaten/ Kota	Stasiun/Pos Iklim	Tanggal	T Max (°C)	Rekor Tertinggi
1	Bali	Buleleng	Pos Iklim Tanguwisia	2 Januari 2024	38,8	38,8
2	Sumatera Utara	Kota Medan	BBMKG Wil. I Medan	18 Juli 2024	38	39,6
3	Sulawesi Tengah	Poso	Stasiun Meteorologi Kasiguncu	7 November 2024	38	39,9
4	Nusa Tenggara Barat	Sumbawa	Stasiun Meteorologi Kaharudin Sumbawa	28 Oktober 2024	38	38,8
5	Nusa Tenggara Timur	Kota Kupang	Stasiun Klimatologi Nusa Tenggara Timur	5 November 2024	37,9	38,6
6	Papua Selatan	Boven Digoel	Stasiun Meteorologi Tanah Merah	5 dan 20 Desember 2024	37,9	39,8
7	Aceh	Banda Aceh	Stasiun Meteorologi Sultan Iskandar Muda	19 Juli 2024	37,9	38,8
8	Jawa Timur	Kota Surabaya	Stasiun Meteorologi Perak I	13 dan 27 Oktober 2024	37,8	38,8
9	Kalimantan Barat	Kapuas Hulu	Stasiun Meteorologi Pangsuma	21 Februari 2024	37,7	37,7
10	Aceh	Aceh Besar	Stasiun Klimatologi Aceh	31 Juli 2024	37,6	37,8

Gambar 1. 2 Lokasi Kejadian Suhu Udara Maksimum Harian tertinggi 2024
Sumber: Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, 2024

Berdasarkan gambar 1.2, dampak perubahan iklim juga terjadi di Indonesia, sepanjang tahun 2024, tercatat suhu maksimum harian tertinggi terjadi pada bulan Oktober hingga Desember. Suhu maksimum harian tertinggi terjadi di daerah Buleleng, Bali, Pada 2 Januari 2024 sebesar 38,8°C. Selanjutnya pada suhu 38,0°C teramati di tiga lokasi yaitu di Medan, Sumatera Utara pada 18 Juli 2024, lalu di Poso, Sulawesi Tengah pada 7 November 2024 dan Sumbawa, Nusa Tenggara Barat pada 28 Oktober 2024. Terlihat pada provinsi Jawa Timur di Kota

Surabaya menjadi lokasi terpanas pada suhu udara mencapai 37,8°C yang menjadi salah satu bukti dampak pemanasan global.

Selanjutnya dampak perubahan iklim juga memberikan permasalahan pada sumber air di Surabaya, dampaknya pada debit air di hulu sumber sungai. Mengutip dari berita detik jatim oleh Direktur Operasioal PDAM Surya Sembada Surabaya yaitu Nanang Widyatmoko mennyampaikan bahwa

“Sejak tahun 2024, kami mulai merasakan dampak langsung dari perubahan iklim. Sungai Brantas, sebagai sumber air baku, mengalami penurunan debit, sehingga aliran air tidak lagi deras seperti biasanya. Kondisi ini memengaruhi proses pembersihan polutan, yang kini harus dilakukan hingga empat kali agar air layak digunakan oleh masyarakat. Penurunan debit yang terus meningkat memaksa petugas untuk melakukan upaya lebih ekstra dalam pengelolaan air.” Sumber:([https://www.detik.com/jatim/berita/d 7460696/perubahan-iklim-jadi-biang-debit-air-di-surabaya-turun](https://www.detik.com/jatim/berita/d-7460696/perubahan-iklim-jadi-biang-debit-air-di-surabaya-turun)) diakses pada 26 Mei 2025.

kegiatan menjaga lingkungan, termasuk memantau perubahan di hulu sungai, menjadi langkah penting dalam mempertahankan kualitas air konsumsi masyarakat di tengah ancaman perubahan iklim. PDAM Surya Sembada Surabaya memanfaatkan Sungai Brantas sebagai sumber utama dengan debit sekitar 12.000 liter per detik, ditambah sumber air Plintihan di Pasuruan sebesar 300 liter per detik, serta sumber air Umbulan sekitar 700 liter per detik..

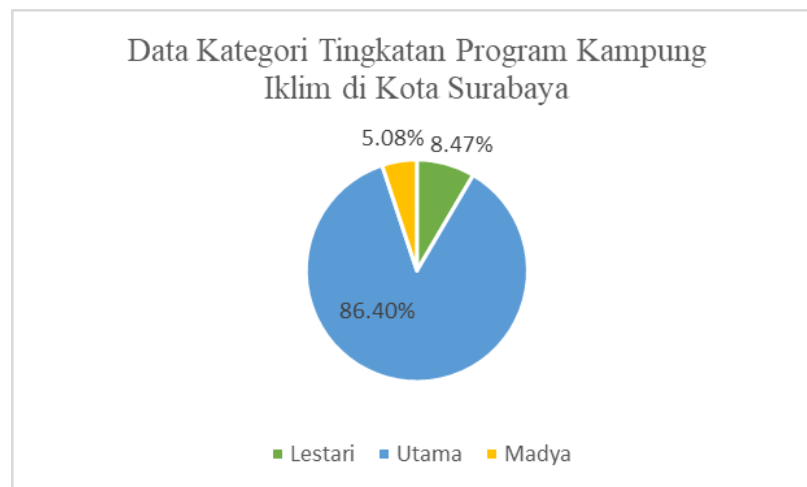
Kota Surabaya menjalankan Program Kampung Iklim dengan mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. 19 Tahun 2012 Pasal 1 Ayat 2 tentang Program Kampung Iklim, serta diperkuat melalui Peraturan Walikota Surabaya Nomor 92 Tahun 2024, tujuan penerbitan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 92 Tahun 2024 tentang Program Kampung Iklim untuk memperkuat pelaksanaan ProKlim di tingkat kota. Berdasarkan pasal 2 ayat (2)

peraturan ini bertujuan untuk mengendalikan dan mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK) melalui berbagai kegiatan ProKlim serta meningkatkan pengetahuan, partisipasi dan kapasitas masyarakat dalam mengelola potensi wilayah untuk mendukung upaya adaptasi dan mitigasi. Kebijakan ini menunjukkan komitmen Pemerintah Kota Surabaya dalam mempercepat implementasi aksi iklim berbasis masyarakat.

Atas pelaksanaan program kampung iklim, Kota Surabaya berhasil meraih sejumlah penghargaan terkait Program Kampung Iklim pada tahun 2024. Dikutip dari berita Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur, Walikota Surabaya oleh Eri Cahyadi menyampaikan

“Pada peringatan HUT RI ke-79, Kota Surabaya memperoleh 23 penghargaan ProKlim dari Kementerian LHK. Jumlah ini menjadi yang terbanyak di Indonesia, dengan beberapa kampung berhasil meraih kategori lestari, utama, dan mandiri. Hal ini menunjukkan bahwa Surabaya mampu berinovasi dalam menjaga dan melestarikan lingkungan.” Sumber: (<https://kominfo.jatimprov.go.id/berita/kota-surabaya-raih-23-penghargaan-program-kampung-iklim>) diakses pada 26 Mei 2025.

Pemerintah Kota Surabaya berhasil meraih penghargaan Piagam Apresiasi Pembina ProKlim dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dua kampung di Surabaya, yaitu RW 1 Banjar Sugihan dan Kelurahan Pagesangan, memperoleh penghargaan dengan kategori tertinggi, yakni ProKlim Lestari. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa Program Kampung Iklim mampu menjadi gerakan yang tidak hanya memberdayakan, tetapi juga mengedukasi masyarakat agar berperan aktif dalam upaya mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim.



Gambar 1. 3 Data Kategori Tingkatan Program Kampung Iklim di Kota Surabaya

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya, 2025

Berdasarkan gambar 1.4 data kategori tingkatan Program Kampung Iklim di Kota Surabaya dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya, bahwa pelaksanaan Program Kampung Iklim didominasi oleh kategori Utama dengan sebesar 86,40% menunjukkan pengelolaan lingkungan yang cukup baik, sementara itu kampung iklim yang mencapai kategori lestari mencapai 8,47% sehingga jumlahnya relatif sedikit dibandingkan total keseluruhan, dan terakhir pada kategori madya menempati persentase kecil sebesar 5,08% yang menunjukkan bahwa sebagian kecil masih pada tahap pengembangan.

Tabel 1. 1 Data Persebaran Program Kampung Iklim di Kecamatan Rungkut

Lokasi	Kelurahan	Kategori	Tahun
RW 5	Kedung Baruk	Utama	2022
RW 9	Rungkut Kidul	Utama	2022
RW 5	Medokan Ayu	Utama	2024
RW 12	Medokan Ayu	Madya	2022

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya, 2025

Berdasarkan tabel 1.1 data persebaran Program Kampung Iklim di Kecamatan Rungkut dari Dinas Lingkungan hidup Kota Surabaya, terdapat

beberapa lokasi yang telah melakukan Program Kampung Iklim. Di tahun 2022 terdapat tiga RW yang aktif mengikuti ProKlim, yaitu RW 5 Kelurahan Kedung Baruk dengan mendapat kategori Utama, RW 12 Kelurahan Medokan Ayu dengan kategori Madya dan RW 9 Kelurahan Rungkut Kidul pada kategori utama. Sejak tahun 2022, pelaksanaan ProKlim di Kecamatan Rungkut sudah mulai tersebar di beberapa kelurahan dengan capaian yang berbeda. Pada tahun 2024 yaitu RW 5 Kelurahan Medokan Ayu berhasil masuk ke kategori utama. Hal tersebut menunjukkan peningkatan kualitas pelaksanaan Program Kampung Iklim, dari tahun 2022 yang hanya terdapat satu RW di Medokan Ayu dengan kategori Madya, kemudian pada 2024 muncul RW 5 Medokan Ayu yang meraih kategori utama. Kondisi ini menunjukkan perkembangan yang signifikan baik dari sisi partisipasi masyarakat maupun pembinaan dari pihak terkait dalam mendukung keberlanjutan lingkungan.

Pada awal pelaksanaan Program Kampung Iklim di Kelurahan Medokan Ayu, khususnya di RW 12 dan RW 5, kondisi masyarakat belum sepenuhnya memiliki kesadaran kolektif terhadap pengelolaan lingkungan. Aktivitas masyarakat masih berjalan seperti biasa tanpa adanya kegiatan berbasis lingkungan yang terstruktur. Partisipasi warga dalam kegiatan lingkungan masih bersifat terbatas dan belum merata di setiap RW. Berawal keterlibatan masyarakat masih didominasi oleh pengurus lingkungan seperti ketua RT/RW dan beberapa warga yang memiliki kepedulian terhadap lingkungan. Sebagian masyarakat lainnya belum terlibat aktif, baik dalam kegiatan perencanaan maupun pelaksanaan program, sehingga partisipasi masih bersifat terbatas dan belum

merata. Kegiatan mitigasi dalam Program Kampung iklim berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.P.84/Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2016 mencakup berbagai upaya untuk menurunkan emisi gas rumah kaca melalui pengelolaan sampah, pemanfaatan energi terbarukan, penghijauan serta pencegahan kebakaran. Pelaksanaan mitigasi dilakukan melalui pengurangan dan pemilahan sampah, pengolahan limbah padat dan cair, penanaman vegetasi, pemanfaatan teknologi ramah lingkungan dan budidaya berkelanjutan. Di Kelurahan Medokan Ayu penerapan mitigasi terlihat pada aktivitas masyarakat melalui pengelolaan bank sampah, pembuatan lubang lubang sisa dapur (lubsida), serta biopori yang berfungsi mengurangi timbunan sampah sekaligus meningkatkan serapan air tanah. Selain itu masyarakat melakukan budidaya hidroponik seperti sawi, bayam, kangkung, seledri, kemangi, dan bunga telang dengan menggunakan lahan kosong untuk kegiatan lingkungan. Pemanfaatan *solar cell* di area kebun menjadi penerapan energi terbarukan untuk mengurangi panas lingkungan serta menekan potensi kebakaran. Maka seluruh kegiatan mitigasi masyarakat Medokan Ayu menunjukkan implementasi ProKlim yang berkontribusi dalam pengurangan emisi karbon di tingkat tapak.

Selain mitigasi, Program Kampung Iklim menekankan kegiatan adaptasi sebagai upaya meningkatkan ketahanan masyarakat pada risiko perubahan iklim seperti kekeringan, banjir, longsor, gangguan ketahanan pangan dan penyakit terkait proklam. Adaptasi dalam ProKlim mencakup seperti pengelolaan air, peningkatan ketahanan pangan, dan kesehatan masyarakat. Di Kelurahan Medokan Ayu, kegiatan adaptasi melalui upaya peningkatan ketahanan pangan

dengan urban farming berbasis hidroponik yang dapat dipanen secara berkala sehingga membantu ketersediaan pangan sehat bagi warga. Selain itu pemanfaatan biopori dan lubang lubsida tidak hanya berperan dalam pengelolaan sampah tetapi juga mendukung penyerapan air untuk mengurangi risiko genangan banjir saat hujan tinggi. Masyarakat juga memproduksi pupuk organik dari limbah kandang ayam yang digunakan aktivitas pertanian untuk mengurangi ketergantungan pada pupuk kimia. Berbagai kegiatan ini memperlihatkan adaptasi di Medokan Ayu pada sistem lingkungan yang berkelanjutan.

Awal mula munculnya kegiatan lingkungan di Medokan Ayu tidak terlepas dari kondisi pandemi COVID-19, di mana sebagian masyarakat memiliki waktu luang lebih karena terbatasnya aktivitas di luar rumah. Kondisi tersebut mendorong warga untuk mencoba kegiatan sederhana seperti menanam tanaman secara hidroponik sebagai bentuk pengisi waktu luang. Kegiatan ini pada awalnya tidak direncanakan untuk mengikuti perlombaan atau program tertentu, melainkan berkembang secara bertahap dari inisiatif masyarakat. Pelaksanaan program kampung iklim di Kelurahan Medokan Ayu tidak hanya bergantung pada partisipasi masyarakat tetapi juga dukungan berbagai pihak dari instansi pemerintah dan pihak swasta. Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya memberikan kontribusi melalui pelatihan pembuatan biopori serta pembinaan budidaya hidroponik yang memperkuat kapasitas masyarakat dalam pengelolaan lingkungan. Dukungan swasta seperti dari alfamart yang menyediakan pelatihan hidroponik, bantuan keranjang bank sampah serta pengembangan produk kreatif seperti lilin minyak jelantah dan minuman es bunga telang dengan pelatihan

pengemasan agar memiliki nilai jual. Sementara itu Bank Danamon membantu proses perintisan kebun hidroponik dengan memberikan pupuk dan media tanam untuk urban farming dapat berjalan. Selain itu dukungan akademisi dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) melalui pemasangan solar cell di kebun hidroponik yang mendukung pemanfaatan energi terbarukan juga mengurangi ketergantungan sumber listrik dari PLN. Berbagai hasil kerja sama untuk mencapai keberhasilan ProKlim di Medokan Ayu memperkuat masyarakat menjalankan aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

Meskipun terdapat dukungan dari pihak eksternal seperti CSR dan instansi terkait, keberlanjutan Program Kampung Iklim di Kelurahan Medokan Ayu tidak sepenuhnya bergantung pada bantuan tersebut. Masyarakat tetap melanjutkan berbagai kegiatan lingkungan secara mandiri, seperti pengelolaan sampah dan urban farming, sebagai bentuk komitmen dalam menjaga keberlanjutan lingkungan. Hal ini menunjukkan adanya kemandirian masyarakat dalam menjalankan Program Kampung Iklim. Dalam pelaksanaan Program Kampung Iklim, koordinasi dan komunikasi antar masyarakat dilakukan melalui berbagai forum informal maupun formal. Kegiatan seperti rapat warga, arisan, serta penyuluhan dari pihak luar menjadi sarana utama dalam menyampaikan informasi, evaluasi kegiatan, serta membangun kesepahaman antar warga. Pola komunikasi ini berperan penting dalam menjaga keberlangsungan program serta meningkatkan partisipasi masyarakat.

Pelaksanaan Program Kampung Iklim, di Kelurahan Medokan Ayu tepatnya di RW 12, salah satunya dengan melakukan *urban farming* yang

dilakukan sejak tahun 2019. Melalui *urban framing* menjadi sebuah langkah dalam bidang pertanian di perkotaan sehingga memanfaatkan lahan terbatas untuk menghasilkan pangan yang bergizi dan meningkatkan ketahanan pangan. Namun dalam pelaksanaan ketika beberapa warga melakukan pembersihan lahan untuk target kegiatan hidroponik, terdapat protes dari warga yang rumahnya tepat berdampingan dengan lahan tersebut.

“warga itu keberatan ada kegiatan hidroponik di lahan samping rumahnya itu. Padahal lahan itu jelas bukan miliknya. Tetapi ya sudah kami bongkar lagi paving yang sudah terpasang dan cari lahan kosong lainnya, kami mulai dari awal, jika di tempat lain punya dan memakai fasum untuk urban farmingnya kami disini satu meter pun tanpa fasum”. Sumber:

(<https://inisurabaya.com/2023/10/proklam-rw-medayu-dari-semangat-gotong-royong-cinta-lingkungan-jadi-destinasi-wisata-edukasi-urban-farming/3/>) diakses pada 28 Mei 2025.

Selain permasalahan terkait penggunaan lahan, Program Kampung Iklim di RW 12 Medokan Ayu juga menghadapi beberapa masalah yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat. Selain itu pergantian ketua RT dan RW setelah diraihnya penghargaan ProKlim Madya juga menyebabkan fokus kegiatan lingkungan menurun karena kepemimpinan baru memiliki prioritas yang berbeda. Di sisi lain beberapa ketua RT seperti RT 1 dan RT 2 menolak bantuan keranjang sampah karena merasa tidak yakin dengan komitmen warga akan kewajiban pelaporan hasil pengumpulan sampah. Memberikan pemahaman akan pentingnya lahan terbuka hijau untuk kehidupan yang baik bagi masyarakat perkotaan cukup sulit karena menemui berbagai tantangan yang muncul akibat benturan dengan hal-hal dasar bagi masyarakat yaitu ekonomi. Tantangan berat yang dihadapi pengurus ProKlim di RW 12 adalah mengajak warga memberi perhatian lebih

pada lingkungan bahkan tidak hanya melakukan penanaman hidroponik juga melakukan kegiatan pemilahan sampah di RT masing-masing. Kemudian, partisipasi dalam kegiatan ProKlim di Kelurahan Medokan Ayu cenderung didominasi oleh kelompok ibu rumah tangga. Hal ini disebabkan karena mereka memiliki waktu yang lebih fleksibel untuk mengikuti kegiatan seperti pengelolaan sampah, urban farming, maupun pelatihan keterampilan. Motivasi keterlibatan mereka tidak hanya karena kepedulian terhadap lingkungan, tetapi juga adanya manfaat tambahan seperti peningkatan keterampilan, peluang ekonomi dari produk olahan, serta interaksi sosial antar warga. Hal ini menunjukkan bahwa keberlanjutan ProKlim sangat bergantung pada konsistensi partisipasi warga dan arah kepemimpinan lokal. Karena itu, penguatan edukasi serta pendampingan berkelanjutan menjadi penting agar komitmen lingkungan dapat terus tumbuh di RW 12 Medokan Ayu.

“kegiatan yang berkaitan dengan upaya pelestarian lingkungan ini sebetulnya bukan hal baru bagi warga disini tetapi memang tidak semasif sekarang” (<https://inisurabaya.com/2023/10/proklim-rw-medayu-dari-semangat-gotong-royong-cinta-lingkungan-jadi-destinasi-wisata-edukasi-urban-farming/3/>) diakses pada 28 Mei 2025.

Dari beberapa kutipan pernyataan tersebut, diketahui bahwasanya telah mendapat kategori madya dalam program kampung iklim diperlukan partisipasi masyarakat yang menjadi tantangan untuk keberlanjutan program. Perlunya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan untuk ikut andil menciptakan kampung sebagai kepentingan bersama untuk menjaga dan melestarikan lingkungan yang lebih baik khususnya dapat berkontribusi dengan

meningkatkan ketahanan masyarakat akan perubahan iklim serta menekan emisi gas rumah kaca.

Pada teori bentuk partisipasi masyarakat menurut Hamijoyo dan Iskandar terdapat lima bentuk keterlibatan yang muncul dalam pelaksanaan partisipasi, namun kondisi di RW 12 Medokan Ayu menunjukkan adanya kesenjangan antara teori dan realitas di lapangan pada hasil observasi pra penelitian. Partisipasi buah pikiran belum berjalan optimal karena beberapa warga dan ketua RT tidak memberikan dukungan dan menolak fasilitas keranjang bank sampah. Partisipasi tenaga juga belum merata karena sebagian warga enggan mengikuti pelatihan dari Dinas Lingkungan dan kegiatan lapangan lebih banyak digerakkan pengurus dibanding warga. Pada partisipasi harta benda, dukungan aset seperti penyediaan lahan masih menghadapi penolakan dari sebagian warga yang tidak setuju lahannya digunakan kebun dan memunculkan konflik dengan pengurus. Lalu partisipasi keterampilan dan kemahiran dengan kegiatan *ecoprint* serta pembuatan minuman es telang. Selain itu, partisipasi sosial menunjukkan kelemahan dengan rendahnya minat warga pada ProKlim serta perubahan prioritas lingkungan setelah pergantian kepemimpinan RT dan RW.

Pemilihan Kelurahan Medokan Ayu sebagai lokasi penelitian didasarkan pada adanya dinamika partisipasi masyarakat yang berbeda antara RW 12 dan RW 5 dalam pelaksanaan Program Kampung Iklim. RW 12 yang lebih awal mengikuti ProKlim menunjukkan berbagai tantangan dalam partisipasi masyarakat, sedangkan RW 5 yang lebih baru justru mampu mencapai kategori utama dalam waktu relatif singkat. Perbedaan kondisi ini menjadi menarik untuk dikaji guna

memahami bagaimana bentuk dan faktor yang memengaruhi partisipasi masyarakat dalam program tersebut. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat diketahui urgensi partisipasi masyarakat dalam suatu kebijakan atau program pemerintah menjadi penting. Peneliti mempunyai ketertarikan melakukan penelitian dengan topik ini karena adanya partisipasi masyarakat di Kelurahan Medokan Ayu, dalam Program Kampung Iklim yang berasal dari kebijakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Oleh karena itu, penulis tertarik memilih penelitian berjudul **“Partisipasi Masyarakat Dalam Program Kampung Iklim Di Kelurahan Medokan Ayu Kota Surabaya”**.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang dikaji yaitu bagaimana partisipasi masyarakat dalam Program Kampung Iklim di Kelurahan Medokan Ayu Kota Surabaya?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini ditujukan guna mengkaji serta mendeskripsikan Partisipasi Masyarakat dalam Program Kampung Iklim Di Kelurahan Medokan Ayu Kota Surabaya.

1.4 Manfaat Penelitian

Merujuk pada tujuan studi sebagaimana dijalankan oleh peneliti mengenai “Partisipasi Masyarakat dalam Program Kampung Iklim di Kelurahan Medokan Ayu Kota Surabaya” diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak terkait. Manfaat penelitian yang diharapkan diantaranya:

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi teoritis yang signifikan terkait partisipasi masyarakat dalam upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim melalui program kampung iklim di wilayah lain.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman secara teori dalam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk pemberdayaan menjaga lingkungan sekitar.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan menambah pengetahuan dan wawasan terkait partisipasi masyarakat dalam program kampung iklim sebagai upaya bersama akan pengendalian iklim serta menjaga dan melestarikan lingkungan sekitar.

2. Bagi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Penelitian ini diharapkan dapat menambah sumber referensi atau kajian di perpustakaan sebagai dasar pemikiran bagi pihak yang membutuhkan terutama penulisan penelitian di masa mendatang.

3. Bagi Instansi (Kelurahan Medokan Ayu)

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan dalam kajian juga diskusi pada program yang sedang berjalan dan output yang dihasilkan, serta memiliki gambaran jika diterapkan pada masyarakat.